

TANTANGAN DAN KENDALA PELAKSANAAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM KURIKULUM 2013 DAN KURIKULUM MERDEKA

Tina Septiana^{*1}, Muhammad Tantan², M. Akbar Maulana Irfan³, Dani Fajar Purnama⁴, Muhammad Samhan⁵, Feri Susanto Sopian⁶

¹Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; [*tinaseptiana@unlip.ac.id](mailto:tinaseptiana@unlip.ac.id)

²Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; ceptantan35@gmail.com

³Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; akbarmaulana1304@gmail.com

⁴Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; fajardani561@gmail.com

⁵Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; msamhan50gg@gmail.com

⁶Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; ferisopian90@gmail.com

^{*)}Corresponding author; E-mail addresses: tinaseptiana@unlip.ac.id

Abstract. Pancasila education plays a strategic role in shaping national character and instilling the values of nationalism in students. However, its implementation often encounters various challenges in both the 2013 Curriculum and the Independent Curriculum. This study aims to analyze the challenges and obstacles in the implementation of Pancasila education within these two curricula in order to provide recommendations for educational policy improvement. The research employs a qualitative approach using a literature study method that examines various scholarly sources related to curriculum development and implementation. The findings indicate that the development of the Pancasila education curriculum has raised public concerns due to the lack of involvement of experts, academics, stakeholders, and teacher professional associations, as well as the absence of a comprehensive evaluation of the previous curriculum. In the 2013 Curriculum, the identified challenges include limited learning resources, minimal time allocation, and an imbalance in the development of attitudes, knowledge, and skills competencies. Meanwhile, in the Independent Curriculum, obstacles arise from the unclear boundaries of the independent learning concept, inadequate facilities and infrastructure, and an unstructured distribution of learning outcomes. These findings imply the need for curriculum policy improvements, increased stakeholder involvement, and adequate resource support so that Pancasila education can be implemented optimally and remain relevant to students' needs in the global era.

Keywords: Independent Curriculum, Pancasila Education, 2013 Curriculum.

Abstrak. Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik. Namun, implementasi pendidikan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, baik pada Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan dan kendala pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada kedua kurikulum tersebut guna memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan pendidikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka yang menelaah berbagai sumber ilmiah terkait pengembangan dan implementasi kurikulum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum Pendidikan Pancasila masih menimbulkan kecurigaan publik karena kurangnya keterlibatan ahli, akademisi, pemangku kepentingan, dan asosiasi profesi guru, serta belum optimalnya evaluasi kurikulum sebelumnya. Pada Kurikulum 2013, kendala yang muncul meliputi keterbatasan sumber belajar, alokasi waktu yang minim, dan ketidakseimbangan pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Sementara itu, pada Kurikulum Merdeka, hambatan terjadi akibat belum jelasnya batasan konsep pembelajaran merdeka, ketidaksiapan sarana prasarana, serta pembagian capaian pembelajaran yang kurang terstruktur. Temuan ini mengimplikasikan perlunya perbaikan kebijakan kurikulum, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, serta penyediaan dukungan sumber daya agar Pendidikan Pancasila dapat terlaksana secara optimal dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era global.

Kata kunci: Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013, Pendidikan Pancasila

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila merupakan salah satu instrumen strategis dalam membentuk karakter bangsa, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dan memperkuat identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi. Perkembangan teknologi, disrupsi informasi, serta tantangan global abad ke-21 menuntut adanya pembaruan sistem pendidikan nasional, termasuk kurikulum, agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang adaptif tidak hanya

menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan keterampilan abad ke-21 yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, kajian mendalam mengenai pelaksanaan Pendidikan Pancasila menjadi penting untuk memastikan tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara optimal.

Seiring perubahan kebijakan pendidikan, kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali revisi, termasuk peralihan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Penelitian terkini menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 mengintegrasikan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang (Firdausyi, 2024). Namun, implementasinya belum optimal karena keterbatasan sumber belajar, alokasi waktu, dan kesiapan guru (Basit et al., 2024). Di sisi lain, Kurikulum Merdeka dirancang lebih fleksibel untuk memberi ruang inovasi pembelajaran, tetapi masih menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan konsep pembelajaran merdeka, ketidaksiapan sarana prasarana, serta ketidakpahaman guru mengenai perbedaan mendasar antara kedua kurikulum (Amiruddin et al., 2023). Rizkasari et al. (2025) juga menekankan bahwa implementasi nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila masih terhambat karena kurangnya kejelasan panduan operasional di lapangan.

Selain itu, problematika lain yang mengemuka dalam pengembangan kurikulum adalah minimnya pelibatan pemangku kepentingan, akademisi, dan asosiasi profesi guru dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik terhadap efektivitas dan transparansi proses pengembangan kurikulum, terutama ketika hasil evaluasi kurikulum sebelumnya tidak sepenuhnya dijadikan dasar penyusunan kurikulum baru (Basit et al., 2024). Dari perspektif teori pengembangan kurikulum, proses yang ideal seharusnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan kurikulum yang relevan dan kontekstual (Dewey, 2001). Fakta-fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara tujuan ideal Pendidikan Pancasila dengan realitas pelaksanaannya di sekolah.

Kajian terdahulu sebagian besar berfokus pada deskripsi perbedaan struktur dan konten kurikulum, namun masih terbatas yang mengkaji tantangan implementasi Pendidikan Pancasila secara komprehensif dari perspektif kedua kurikulum sekaligus. Padahal, analisis menyeluruh terhadap hambatan dan tantangan implementasi sangat penting untuk memberikan masukan konkret bagi kebijakan pendidikan dan strategi pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kendala dan tantangan pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, serta memberikan rekomendasi perbaikan berbasis kajian literatur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan kendala pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada kedua kurikulum tersebut dan menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat. Adapun hipotesis yang diajukan adalah bahwa pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka menghadapi hambatan struktural, konseptual, dan implementatif yang dapat diatasi melalui peningkatan pelibatan pemangku kepentingan, penyiapan sumber daya, dan perbaikan desain kurikulum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan yang berfokus pada analisis tantangan dan kendala pelaksanaan Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Penelitian dilaksanakan pada bulan April–Juni 2025 dengan menghimpun sumber-sumber literatur dari buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan kurikulum yang relevan. Sumber data utama diperoleh dari publikasi lima tahun terakhir yang membahas pengembangan dan

implementasi Pendidikan Pancasila, termasuk kebijakan kurikulum, adaptasi guru, serta capaian Profil Pelajar Pancasila. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang mengidentifikasi, menelaah, dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti memilih dan mengklasifikasikan informasi yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap penyajian dilakukan dengan mengorganisasi data ke dalam kategori tantangan dan kendala pelaksanaan Pendidikan Pancasila sesuai struktur pembahasan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang memuat sintesis hasil temuan dan rekomendasi berdasarkan kesenjangan yang ditemukan di literatur. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari beberapa penulis dan publikasi yang berbeda (Zed, 2008). Hasil analisis ini selanjutnya diuraikan secara sistematis pada bagian hasil dan pembahasan, sesuai urutan rumusan masalah yang telah dirumuskan pada pendahuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada Kurikulum 2013

Pelaksanaan Pendidikan Pancasila di era Kurikulum 2013 menghadapi beragam tantangan mendasar yang berkaitan dengan desain kurikulum, kesiapan pendidik, dan dukungan kebijakan. Secara umum, tujuan utama Pendidikan Pancasila adalah membentuk karakter dan kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Namun, dalam implementasinya, Kurikulum 2013 lebih menekankan aspek kognitif sehingga aspek sikap dan keterampilan belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal. Hal ini terlihat dari orientasi penilaian yang cenderung mengukur kemampuan akademik siswa, sementara penilaian sikap sering kali dilakukan secara administratif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal Pendidikan Pancasila dengan praktik di lapangan. Basit et al. (2024) menegaskan bahwa hambatan terbesar implementasi Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum 2013 adalah keterbatasan inovasi pembelajaran dan lemahnya integrasi nilai Pancasila dalam kehidupan nyata siswa.

Selain itu, alokasi waktu yang terbatas menjadi salah satu tantangan signifikan yang menghambat keberhasilan Pendidikan Pancasila. Di banyak sekolah, mata pelajaran ini hanya mendapat porsi dua jam per minggu, sehingga guru kesulitan mengembangkan strategi pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Akibatnya, pembelajaran cenderung bersifat ceramah dan hafalan, tanpa melibatkan pengalaman belajar aktif yang dapat menumbuhkan kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ginanjar et al. (2024) mengungkapkan bahwa pembelajaran abad 21 seharusnya mengedepankan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas, namun kondisi tersebut belum sepenuhnya tercapai di lapangan. Keterbatasan waktu ini juga menghambat upaya pengintegrasian nilai Pancasila ke dalam kegiatan proyek atau kegiatan berbasis masalah, yang sejatinya efektif untuk membentuk karakter siswa.

Selain keterbatasan waktu, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran Pendidikan Pancasila masih menjadi masalah. Banyak guru belum memahami strategi pembelajaran inovatif yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Sebagian besar masih menggunakan pendekatan konvensional, seperti metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan tertulis. Metode tersebut kurang mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila pada diri siswa. Menurut Dewey (2001), pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses membangun makna. Akan tetapi, guru sering kali

terjebak pada rutinitas mengajar berbasis buku teks tanpa memperkaya materi dengan sumber belajar kontekstual. Akibatnya, siswa hanya memahami Pancasila secara teoretis, bukan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan media dan sumber belajar. Meskipun teknologi informasi telah berkembang pesat, banyak sekolah belum memanfaatkannya untuk pembelajaran Pendidikan Pancasila. Basit et al. (2024) menunjukkan bahwa mayoritas guru masih mengandalkan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar. Padahal, pembelajaran abad 21 membutuhkan media yang bervariasi, seperti video edukatif, platform digital, dan simulasi interaktif. Minimnya pemanfaatan media inovatif menyebabkan pembelajaran kurang menarik dan tidak relevan dengan kehidupan siswa. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa siswa cenderung menganggap mata pelajaran ini membosankan dan tidak aplikatif dalam kehidupan nyata mereka.

Dari aspek kebijakan, Kurikulum 2013 memang memberikan pedoman umum tentang pembelajaran Pendidikan Pancasila. Namun, pedoman tersebut belum memberikan arahan teknis yang detail tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Akibatnya, implementasi pendidikan karakter masih berjalan secara parsial. Abdullah dan Wahyudi (2020) menyatakan bahwa diperlukan paradigma baru dalam Pendidikan Pancasila yang menekankan keterpaduan antara pembelajaran di kelas dengan kehidupan nyata siswa. Tanpa adanya kebijakan yang jelas dan dukungan teknis yang memadai, pendidikan karakter melalui Kurikulum 2013 sulit mencapai hasil optimal.

Tabel 1. Perbandingan Tantangan Kurikulum pada Pelaksanaan Pendidikan Pancasila

Aspek	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka
Sumber belajar	Terbatas, dominan buku teks	Variatif, tapi tidak merata pemanfaatannya
Alokasi waktu	Minim, fokus kognitif	Fleksibel, tapi panduan teknis lemah
Kesiapan guru	Metode tradisional, belum abad 21	Adaptasi belum merata, perlu pendampingan
Sarana prasarana	Cukup, tapi belum optimal	Banyak sekolah kekurangan fasilitas
Panduan konsep	Jelas, terstruktur	Belum ada batasan jelas

Secara keseluruhan, tantangan implementasi Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum 2013 terletak pada keterbatasan waktu, keterampilan guru, media pembelajaran, dan kebijakan teknis. Temuan ini mengindikasikan adanya gap antara desain kurikulum dan praktik di lapangan. Gap ini perlu dijembatani dengan inovasi pembelajaran, dukungan teknologi, dan kebijakan yang komprehensif. Jika tantangan-tantangan ini tidak segera diatasi, tujuan Pendidikan Pancasila untuk membentuk warga negara yang ber karakter dan memiliki kesadaran kebangsaan akan sulit tercapai. Kondisi inilah yang menjadi dasar mengapa penelitian ini penting dilakukan, sebagai upaya memberikan rekomendasi perbaikan berbasis kajian literatur mutakhir.

Kendala Pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai respons terhadap berbagai keterbatasan Kurikulum 2013, dengan menawarkan fleksibilitas yang lebih besar bagi guru dan sekolah. Namun, pelaksanaan Pendidikan Pancasila dalam kurikulum ini tidak lepas dari kendala.

Salah satu kendala mendasar adalah ketidakjelasan panduan teknis bagi guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui Profil Pelajar Pancasila. Meskipun konsep ini telah dirumuskan dengan baik, banyak guru masih kesulitan memahami indikator capaian pembelajaran yang bersifat umum dan kurang operasional. Rizkasari et al. (2025) menemukan bahwa guru mengalami kebingungan ketika harus mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila, terutama pada aspek penguatan karakter yang bersifat abstrak. Hal ini mengakibatkan variasi implementasi yang sangat berbeda antar sekolah, sehingga tujuan nasional pembentukan karakter Pancasila menjadi kurang seragam.

Selain masalah panduan, kendala lain yang menonjol adalah kesiapan guru dalam merancang pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*) yang menjadi salah satu ciri khas Kurikulum Merdeka. Banyak guru masih terbiasa dengan metode pengajaran konvensional, sehingga sulit beradaptasi dengan tuntutan kurikulum baru yang menekankan partisipasi aktif siswa. Pohontu et al. (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar guru PPKn di Gorontalo merasa kesulitan merancang proyek yang relevan dengan kehidupan nyata siswa dan sekaligus mampu mengintegrasikan nilai Pancasila. Keterbatasan ini bukan hanya masalah kompetensi pedagogik, tetapi juga minimnya pelatihan yang diberikan kepada guru. Meskipun pemerintah telah mengadakan berbagai program pelatihan, banyak guru di daerah terpencil yang tidak memiliki akses memadai terhadap pelatihan tersebut.

Ketimpangan sarana dan prasarana juga menjadi kendala serius dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek membutuhkan fasilitas yang mendukung, seperti akses internet, perangkat teknologi, serta lingkungan belajar yang kondusif. Amiruddin et al. (2023) menegaskan bahwa sekolah-sekolah di wilayah perkotaan relatif lebih siap menerapkan Kurikulum Merdeka karena memiliki sumber daya yang memadai. Sebaliknya, sekolah di daerah tertinggal masih mengalami kesulitan karena keterbatasan fasilitas. Akibatnya, pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis proyek yang seharusnya menarik dan kontekstual sering kali hanya berhenti pada tataran konsep tanpa implementasi nyata. Hal ini memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah dan berpotensi menghambat pemerataan mutu pendidikan nasional.

Kendala lainnya adalah perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan terkait tujuan Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. Beberapa sekolah menafsirkan fleksibilitas kurikulum sebagai kebebasan untuk mengurangi porsi pembelajaran PPKn, padahal mata pelajaran ini tetap memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa. Basit et al. (2024) mengungkapkan bahwa tanpa pemahaman yang sama mengenai urgensi Pendidikan Pancasila, terjadi inkonsistensi implementasi antar sekolah. Guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa sering kali memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana nilai Pancasila seharusnya diajarkan. Ketidakselarasan persepsi ini berakibat pada lemahnya dukungan terhadap program-program pembentukan karakter di sekolah (Saryono, 2024).

Selain itu, meskipun Kurikulum Merdeka menawarkan keleluasaan dalam memilih materi dan metode pembelajaran, keleluasaan tersebut justru menjadi kendala bagi sebagian guru yang terbiasa dengan kurikulum yang lebih terstruktur. Beberapa guru merasa kebingungan dalam menentukan materi esensial dan cara mengaitkannya dengan konteks lokal. Pohontu et al. (2024) menyatakan bahwa guru membutuhkan bimbingan teknis yang lebih terarah untuk mengoptimalkan otonomi yang diberikan Kurikulum Merdeka. Tanpa arahan yang jelas, ada risiko bahwa pembelajaran Pancasila hanya menjadi aktivitas seremonial tanpa memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sikap dan perilaku siswa. Kondisi ini menunjukkan

perlunya keseimbangan antara fleksibilitas kurikulum dengan dukungan sistem yang memadai.

Secara keseluruhan, kendala pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa meskipun kurikulum ini dirancang untuk mengatasi kekurangan Kurikulum 2013, masih terdapat tantangan besar dalam penerapannya. Tantangan tersebut mencakup ketidakjelasan panduan, kesiapan guru, ketimpangan sarana, perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan, dan kesulitan dalam memanfaatkan fleksibilitas kurikulum. Hal ini menegaskan adanya gap antara konsep ideal Kurikulum Merdeka dan realitas di lapangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan strategi komprehensif berupa penguatan kapasitas guru, pemerataan sarana, dan kebijakan teknis yang lebih jelas. Dengan demikian, implementasi Pendidikan Pancasila dapat berjalan lebih efektif dan konsisten di seluruh Indonesia.

Rekomendasi dan Implikasi

Hasil penelitian mengenai tantangan dan kendala pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka memberikan gambaran nyata tentang adanya kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan. Kesenjangan tersebut perlu diatasi dengan rekomendasi yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya evaluasi kurikulum secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan secara lebih luas, termasuk akademisi, praktisi pendidikan, dan organisasi profesi guru. Evaluasi yang dilakukan harus berbasis data dan mempertimbangkan hasil penelitian mutakhir tentang efektivitas pembelajaran Pendidikan Pancasila. Dengan demikian, kebijakan yang lahir tidak sekadar bersifat administratif, tetapi benar-benar relevan dengan kebutuhan lapangan. Upaya ini akan membantu mengurangi kecurigaan publik terhadap proses pengembangan kurikulum yang selama ini dinilai kurang transparan (Basit et al., 2024).

Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat kapasitas guru melalui program pelatihan berkelanjutan yang difokuskan pada implementasi Pendidikan Pancasila berbasis pendekatan kontekstual dan proyek. Guru perlu dibekali dengan keterampilan merancang kegiatan belajar yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa. Penelitian Pohontu et al. (2024) menunjukkan bahwa guru yang mengikuti pelatihan berbasis praktik nyata lebih mampu mengaitkan pembelajaran PPKn dengan konteks sosial dan budaya lokal. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan program pendampingan bagi guru, khususnya di daerah tertinggal, agar kesenjangan kualitas pembelajaran antarwilayah dapat diminimalkan. Dengan guru yang kompeten dan adaptif, penerapan kurikulum apa pun akan lebih efektif dan berdampak positif bagi siswa.

Dari sisi sarana dan prasarana, rekomendasi yang penting adalah pemerataan akses fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Implementasi Kurikulum Merdeka menuntut ketersediaan sumber daya pendukung seperti jaringan internet, perangkat teknologi, dan ruang belajar yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur, pembelajaran berbasis proyek sulit dilakukan secara optimal. Amiruddin et al. (2023) mengemukakan bahwa ketimpangan fasilitas antara sekolah perkotaan dan pedesaan berkontribusi besar terhadap perbedaan kualitas pembelajaran. Untuk itu, kebijakan afirmasi perlu dirancang, misalnya melalui pengalokasian dana khusus untuk peningkatan fasilitas sekolah di daerah tertinggal (Purnama, 2023). Dengan infrastruktur yang memadai, guru dan siswa dapat melaksanakan pembelajaran Pendidikan Pancasila dengan lebih kreatif dan interaktif.

Selain aspek teknis, rekomendasi lain yang tidak kalah penting adalah membangun pemahaman bersama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai urgensi Pendidikan Pancasila. Banyaknya perbedaan persepsi mengenai tujuan dan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu diatasi melalui forum komunikasi antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua. Forum ini dapat berbentuk seminar, lokakarya, maupun diskusi publik yang membahas pentingnya Pendidikan Pancasila dalam membentuk generasi yang berkarakter. Abdullah dan Wahyudi (2020) menegaskan bahwa keberhasilan Pendidikan Pancasila memerlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tanpa pemahaman dan dukungan bersama, program pembentukan karakter akan sulit mencapai hasil yang diharapkan, meskipun kurikulumnya sudah dirancang sebaik mungkin.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Pendidikan Pancasila tidak hanya ditentukan oleh desain kurikulum, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem pendidikan secara keseluruhan. Penelitian Dewey (2001) mengenai teori pengembangan kurikulum menekankan bahwa kurikulum harus bersifat dinamis dan kontekstual sesuai dengan perkembangan masyarakat. Artinya, pengembangan kurikulum tidak dapat dilakukan secara statis atau hanya berdasarkan dokumen formal, tetapi harus melibatkan partisipasi aktif para pelaksana di lapangan. Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model pendidikan karakter yang lebih efektif, yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan siswa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi praktisi pendidikan, tetapi juga bagi pengambil kebijakan dan peneliti di bidang pendidikan karakter.

Akhirnya, implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya strategi implementasi Pendidikan Pancasila yang disesuaikan dengan konteks sekolah. Strategi tersebut mencakup diferensiasi pembelajaran, dukungan teknologi, dan penguatan kapasitas guru melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Pemerintah juga perlu mengembangkan pedoman teknis yang lebih operasional dan mudah dipahami, agar guru memiliki acuan yang jelas dalam mengajar. Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bahwa keberhasilan Pendidikan Pancasila tidak dapat dicapai hanya dengan mengubah kurikulum, tetapi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh komponen pendidikan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan Pendidikan Pancasila dapat benar-benar menjadi sarana pembentukan generasi penerus bangsa yang berkarakter, berpengetahuan, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka menghadapi tantangan dan kendala yang bersifat multidimensional, mulai dari keterbatasan kompetensi guru, sarana dan prasarana yang belum merata, hingga perbedaan persepsi mengenai tujuan dan metode pembelajaran. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi implementasi yang holistik dan kontekstual dengan melibatkan guru, pemerintah, dan masyarakat secara kolaboratif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, pemerataan fasilitas pendidikan, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional agar nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi secara efektif oleh siswa. Implikasi penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan kurikulum dan praktik pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. K. P., & Wahyudi, A. (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Abad 21 dalam Kurikulum 2013 Jenjang SMA*. Yogyakarta: UNY Press.
- Amiruddin, A., Simanjuntak, R., Meliala, H. P., Tarigan, N., & Ketaren, A. (2023). Perbandingan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5487-5492. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11934>
- Basit, A., Sapriya, S., Budimansyah, D., Komalasari, K., & Abdillah, F. (2024). Problematika dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Berdasarkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(3), 221-229. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v9i3p%25p>
- Dewey, J. (2001). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Firdausyi, M. F. (2024). MUTU PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI INDONESIA. *Educatus*, 2(2), 9-15. <https://doi.org/10.69914/educatus.v2i2.12>
- GINANJAR, D., & PURNAMA, W. W. (2023). Optimizing Legal Strategies: Combating Corruption through Anti-Corruption Education in Universities. *Veteran Law Review*, 6(2), 122-132. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6477>
- GINANJAR, D., FIRMAN, M., SUNANDI, I., PURNAMA, W. W., & MAHARANI, N. (2024). Evolusi Pendidikan Kewarganegaraan: dari Pendekatan Berbasis Pengetahuan ke Perspektif yang Lebih Luas. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(4), 57-64. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3263>
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Yuniawan Heru Santoso, S. E., Paharuddin, S. T., Firman Yasa Utama, S. P., Wico, J. T., & Eliyah, S. K. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Pohontu, V., Adhani, Y., & Yunus, R. (2024). Adaptasi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 12 Kota Gorontalo. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 188-196. <https://doi.org/10.46963/asatiza.v5i2.1799>
- Purnama, W. W. (2020). Tantangan dan Peluang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading di Pasar Modal. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 10(2), 134-141. <https://doi.org/10.30999/mjn.v10i2.2747>
- Purnama, W. W. (2021). Efektivitas Peraturan Pertanahan dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Tanah tanpa Izin. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 14(02), 42-48. <https://doi.org/10.59582/sh.v14i02.921>
- Purnama, W. W. (2022). Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(02), 96-101. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.922>
- Purnama, W. W. (2023). Tantangan Perlindungan Dana Nasabah pada Layanan Equity Crowdfunding di Era Industri 4.0: Analisis Peraturan OJK. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 6(2), 174-183. Retrieved from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/10344>
- Rizkasari, E., Khalifah, V. N., & Mareta, V. (2025). Tantangan Implementasi Nilai-Nilai Profil Pelajar Pancasila dalam Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Merdeka

- Belajar. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(1), 429-437. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i1.309>
- Saryono, S. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digitalisasi 5.0: Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Dasar. *Educatus*, 2(2), 16-21. <https://doi.org/10.69914/educatus.v2i2.13>
- Sundari, L. (2024). PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER: MEMBANGUN KEPERIBADIAN UNGGUL MELALUI PEMBELAJARAN. *Educatus*, 2(1), 13-18. <https://doi.org/10.69914/educatus.v2i1.11>
- Widiyastuti, N. E., Sanulita, H., Waty, E., Qani'ah, B., Purnama, W. W., Tawil, M. R., ... & Rumata, N. A. (2023). *INOVASI & PENGEMBANGAN KARYA TULIS ILMIAH: Panduan Lengkap Untuk Penelitian dan Mahasiswa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.